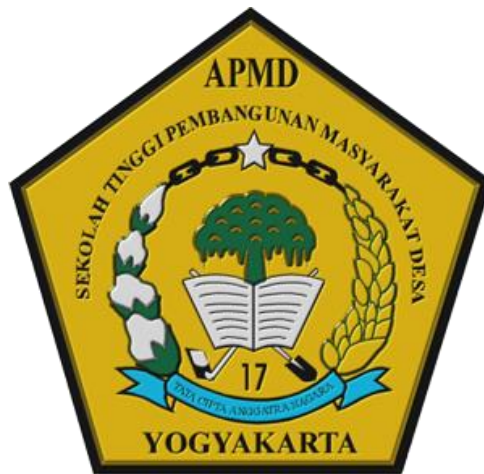


SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENDUKUNG
KETERSEDIAAN PANGAN**

*(Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta)*



Disusun Oleh:

NAMA: MUHAMMAD NABIL

NIM: 18520150

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

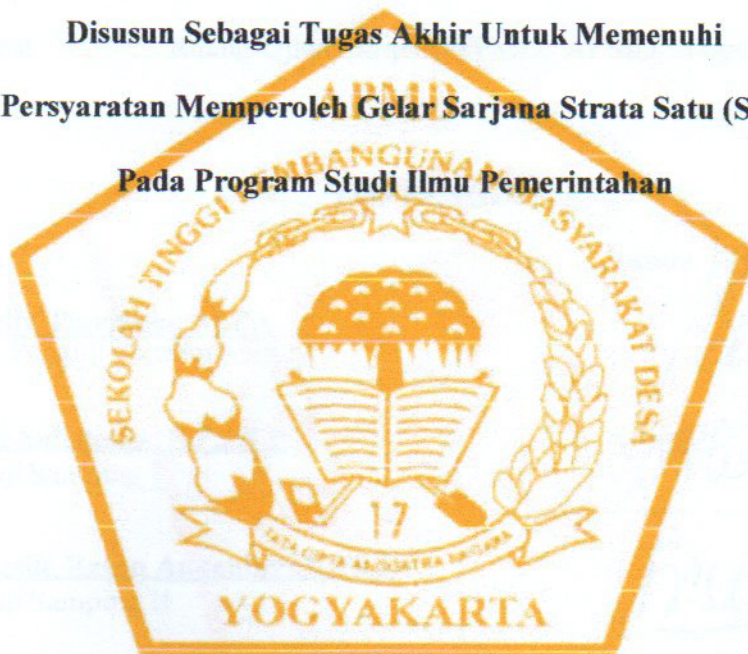
HALAMAN JUDUL

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM Mendukung
KETERSEDIAAN PANGAN**

**(Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun Oleh:

MUHAMMAD NABIL

NIM: 18520150



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**



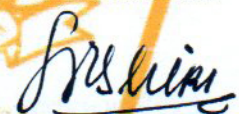
YOGYAKARTA

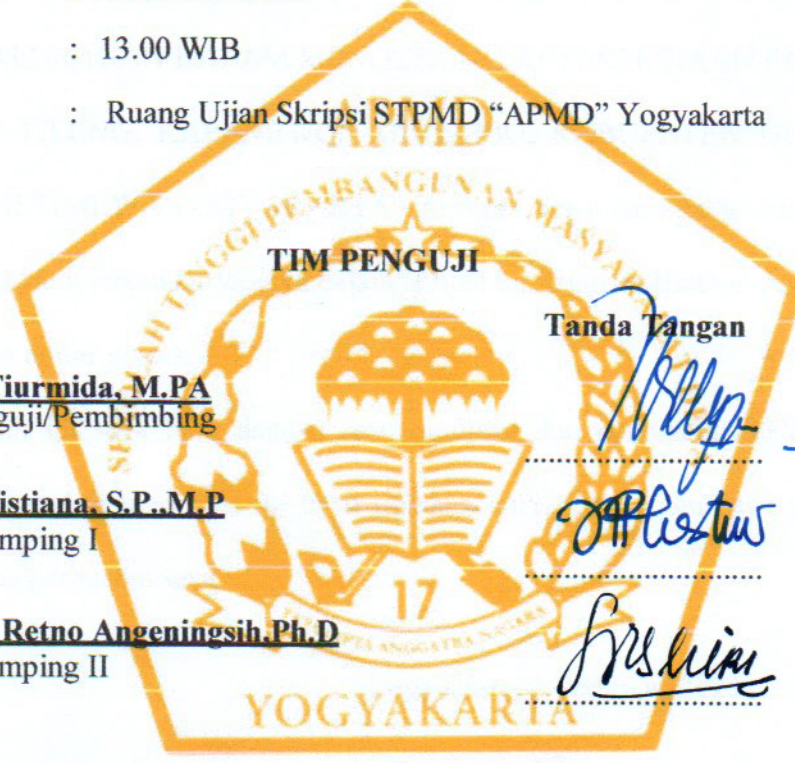
2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

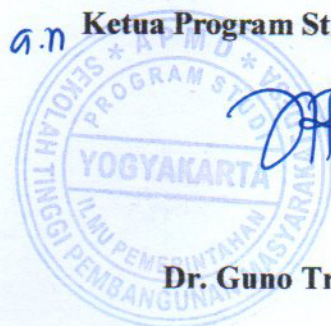
Hari : Rabu
Tanggal : 1 Februari 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Ir. Nelly Tiurmida, M.PA</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
2. <u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping I	
3. <u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u> Penguji Samping II	



Mengetahui,

a.n Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M. A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nabil

NIM : 18520150

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM Mendukung Ketersediaan Pangan di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta" ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 1 Februari 2023



Muhammad Nabil

MOTTO

Kamu tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama dua kali.

(Penulis)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Terbentur, terbentur, terbentur, TERBENTUK.

(Tan Malaka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan rahmat tak terhingga kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melindungi, memberi jalan dan memberkati segala usaha dan karya saya sejauh ini. Secara khusus saya bersyukur atas berkat dan perlindungan Allah SWT dalam proses pembuatan skripsi ini. Sejak awal menyusun proposal hingga saat ini saya selalu merasakan berkat dan perlindungan Allah SWT yang tak terhingga. Saya juga berterimakasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendukung saya, sehingga saya bisa melangkah sejauh ini. *Pertama*, untuk Bapa Chaerul Asrie Achmad dan Mama Ferawati. Terima kasih Bapa dan Mama sudah selalu bersama saya dalam suka dan duka. Terima kasih sudah selalu sabar dan tabah dalam mendukung, mendidik dan mendoakan saya. Segala kesuksesan saya hari ini dan hari selanjutnya, saya persembahkan untuk Bapa dan Mama. *Kedua*, terima kasih untuk Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.PA yang telah memberikan saya banyak petunjuk dan membimbing saya dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini. *Ketiga*, terima kasih untuk adik saya tercinta Quinsyah Gendis Achmad. Semoga apa yang telah saya perjuangkan sejauh ini dapat menjadi motivasi bagi kalian berdua di masa depan. Saya berharap kalian bisa jauh lebih baik dari saya. *Keempat*, terima kasih untuk teman-teman saya Tino, Juan, Ando, Valdes, Sukur, Mario yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rahmat tak terhingga kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi dengan judul **KEBIJAKAN PEMERINTAH KALURAHAN DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN PANGAN DI KALURAHAN TILENG, KAPANEWON GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**. Saya menyadari bahwa pembuatan tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik melalui doa, bimbingan, saran dan sebagainya. Untuk itu pada kesempatan ini saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah menjadi wadah bagi saya dalam menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A, selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, M.PA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak /Ibu Utami Sulistiana, S.P.,M.P selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dalam skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih,Ph.D selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan pada skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik saya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan.
8. Pemerintahan Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat kita semua.

Yogyakarta, 1 Februari 2023
Penulis

Muhammad Nabil

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
INTISARI	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Litereatur Review	10
G. Kerangka Konseptual	14
1. Kebijakan	14
2. Pemerintah Desa	14
3. Ketersediaan Pangan	17
H. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Subjek Penelitian	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
4. Teknik Analisis Data	23
BAB II	25
DESKRIPSI WILAYAH KALURAHAN TILENG KAPANEWON GIRISUBO	25
KABUPATEN GUNUNG KIDUL	25
A. Geografis	25
B. Demografis	27
C. Sosial Ekonomi	30
D. Sarana Dan Prasarana	31
E. Budaya	32

F. Pertanian.....	33
G. Pemerintahan	35
BAB III	36
HASIL DAN PEMBAHASAN	36
1. Deskripsi Informan	36
2. Bentuk Inovasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung ketersediaan pangan	37
3. Bentuk Dukungan Masyarakat dalam penerapan Inovasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan	46
BAB IV	56
PENUTUP	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	27
Tabel II. 1. Penduduk Berdasarkan Usia.....	28
Tabel II. 2. Jumlah Penduduk Menurut Berdasarkan Pekerjaan/ Mata Pencaharian	29
Tabel II. 4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	29
Tabel II. 5. Luas Lahan Masing-Masing Kelompok Tani.....	33
Tabel II. 6. Informasi Produk Pertanian.....	34
Tabel II. 8. Data Informan.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Wilayah Kalurahan Tileng	26
Bagan II.2 Struktur Pemerintahan Kalurahan Tileng.....	35

INTISARI

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang di olah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, ataupun pembuatan makanan dan minuman. Pengertian pangan di atas merupakan definisi pangan, yaitu dikeluarkan oleh badan dunia untuk urusan pangan, yaitu Food and Agricultural Organization (FAO).

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah bentuk inovasi kebijakan pemerintah kalurahan dalam mendukung ketersediaan pangan dan bentuk dukungan masyarakat dalam penerepan kebijakan pemerintah kalurahan dalam mendukung ketersediaan pangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Obyek penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk inovasi kebijakan pemerintah kalurahan dalam mendukung ketersediaan pangan di Kalurahan Tileng. Teknik pemilihan subyek penelitian dengan meminta informan atau narasumber sebanyak 11 orang informan secara purposive, dipilih dianggap tahu persoalan yang dianggap peneliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, bentuk kebijakan pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan yaitu dengan melakukan penggemukan sapi, pembagian bibit buah-buahan, dan melakukan 3 jenis program jangka pendek, menengah, dan panjang. *Kedua*, bentuk dukungan masyarakat terhadap penerapan inovasi kebijakan pemerintah kalurahan dalam mendukung ketersediaan pangan berupa partisipasi berupa kepedulian terhadap kebijakan yang diberikan pemerintah walaupun hasilnya belum begitu cukup memuaskan.

Kata kunci: Inovasi, Pemerintah Kalurahan, dan Masyarakat

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang di olah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, ataupun pembuatan makanan dan minuman. Pengertian pangan di atas merupakan definisi pangan, yaitu dikeluarkan oleh badan dunia untuk urusan pangan, yaitu Food and Agricultural Organization (FAO).

Berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan, pengertian pangan di kelompokkan berdasarkan pemrosesannya, yaitu: *pertama*, bahan makanan yang di olah, yaitu bahan makanan yang dibutuhkan proses lebih lanjut, sebelum akhirnya siap untuk di konsumsi. Pemrosesan di sini berupa proses pengubahan bahan dasar menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi untuk tujuan tertentu dengan menggunakan Teknik tertentu pula. Contoh bahan makanan olahan adalah nasi, pembuatan sagu, pengolahan gandum, pengolahan singkong, pengolahan jagung, dan lain sebagainya. *Kedua*, bahan makan yang tidak diolah, yaitu bahan makanan yang langsung untuk di konsumsi atau tidak membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut. Jenis makanan ini sering dijumpai untuk kelompok buah-buahan dan beberapa jenis sayuran.

Sementara Pangan di kampung saya yaitu daerah Maluku Utara tepatnya di kepulauan Bacan berikut olahan-olahan pangan didaerah saya. Olahan pangan khas Maluku terkenal dengan rempah-rempahnya yang khas. Termasuk pala yang menjadi rempah-rempah melegenda di Tanah Maluku. Makanan khas Maluku beraneka ragam.

Salah satunya ialah papeda, olahan dari sagu yang menjadi makanan pokok sebagian masyarakat Maluku. Ada juga makanan khas Maluku sambal colo-colo, perpaduan cabai pedas dan rempah lainnya. Tak hanya itu, adapun olahan hasil dari nelayan seperti ikan di olah menjadi gohu ikan menjadi makanan khas Maluku yang cukup populer. Sajian ikan laut mentah, bak Sushi dari Jepang namun punya banyak rempah. Kemudian di Kalurahan Tileng inipun cukup menarik perhatian saya untuk olahan pangannya yang belum pernah saya dapatkan di kampung saya sendiri dan ini yang membuat saya tertarik untuk meneliti lebih dalam untuk ketersediaan pangan di Kalurahan Tileng.

Bahan baku pangan secara umum dapat dikatakan untuk diolah lebih lanjut ataupun dapat langsung di konsumsi (tanpa diolah). Dalam proses pengolahan ini juga dibutuhkan bahan tambahan, berupa bumbu masak, bahan-bahan penyedap, dan bahan-bahan lainnya yang berfungsi untuk pelengkapan penyajian makanan. Pengertian pangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini atau sesuai dengan konteks ketahanan pangan nasional difokuskan pada jenis pangan yang mendominasi kandungan karbohidrat. Jenis makanan atau pangan yang dimaksudkan terdiri atas beras, jagung, ketela, singkong, jenis ubi-ubian, dan jenis ketela.

Diversifikasi atau penganekaragaman adalah suatu cara untuk mengadakan lebih dari satu jenis barang atau komoditi yang di konsumsi. Di bidang pangan, diversifikasi memiliki dua makna, yaitu tanaman diversifikasi tanaman pangan dan diversifikasi konsumsi pangan. Kedua bentuk diversifikasi tersebut masih berkaitan dengan upaya untuk mencapai ketahanan pangan. Apabila diversifikasi tanaman pangan berkaitan dengan teknis pengaturan pola bercocok tanam, maka diversifikasi konsumsi pangan akan mengatur atau mengelola pola konsumsi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang besar di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengeluarkan keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Kepmendes ini diterbitkan pada tanggal 11 juli 2022 dengan pertimbangan untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa. Namun yang jelas masyarakat desa sudah pasti memikirkan karena untuk kepentingannya sehari-hari.

Adapun pedoman ketahanan pangan tersebut ditempatkan pada Lampiran Keputusan Menteri PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam Penguatan Ketahanan Pangan masyarakat di Desa. Isi dari Pedoman Ketahanan Pangan di Desa didalamnya adalah kebijakan dan indikator ketahanan pangan di desa, program ketahanan pangan di desa dan peran kelembagaan di desa. Pertimbangan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa adalah:

- a. Bahwa untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke 3 (tiga) se Asia Tenggara (Global Hunger Index, 2021). Untuk itu desa harus segera bersiap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan. Disamping hal tersebut, Indonesia juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal upaya pemenuhan ketahanan pangan, disebabkan wilayah Indonesia memiliki karakter yang beragam dan laju pertumbuhan penduduk terus bertambah 1,1% per tahun (setara dengan 2,5 juta orang).

Tingginya tingkat kelaparan tersebut juga berdampak besar pada aspek Kesehatan di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan gizi. Hal ini dibuktikan berdasarkan Data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Untuk menghadapi kondisi krisis pangan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana, dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin Desa menghadapi krisis pangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

Ketahanan Pangan adalah keadaan terpenuhinya gizi bagi negara kepada masyarakat yang tercermin dari keterjangkauan pangan yang memadai baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, beragam, bergizi, adil dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama. Keyakinan dan budaya daerah setempat, memiliki pilihan untuk hidup. Terdengar, dinamis, dan bermanfaat dengan cara yang dapat diatur. Ketahanan pangan adalah kondisi dimana, terpenuhinya pangan bagi masyarakat hingga pada tingkat individu (Nugroho & Mutisari, 2015). Ketahanan pangan itu, dinilai dengan ketersediaan pangan yang cukup, dari jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, merata, bergizi, dan terjangkau (Asmara, et al., 2012). Ketahanan pangan adalah keadaan yang mana penduduk dapat mencukupi kebutuhan pangannya (Amara, et al., 2012). Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020) ada tiga aspek yang memengaruhi tingkat ketahanan pangan, yakni:

1. Ketersediaan pangan merupakan kondisi dimana tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan jika kedua sumber utama belum bisa memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung mulai tingkat nasional, regional, kabupaten/kota hingga tingkat masyarakat.
2. Akses pangan merupakan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui salah satu atau kombinasi dari beragam sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, barter, pembelian, pinjaman, hadiah, dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan pada suatu daerah ada, akan tetapi tidak bisa diakses oleh rumah tangga tertentu apabila mereka tidak mampu secara fisik seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, mengakses keragaman dan jumlah makanan yang cukup.

3. Pemanfaatan pangan merupakan penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu dalam memetabolisme dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan sendiri meliputi cara pengolahan, penyimpanan, dan penyiapan makanan, keamanan air untuk memasak dan minum, kebiasaan pemberian makan, kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, dan status kesehatan seluruh anggota rumah tangga. Peran dari seorang ibu yang besar dalam meningkatkan kesehatan gizi keluarga, terutama untuk bayi maupun anak-anak, pendidikan ibu juga sering menjadi variabel untuk mengukur pemanfaatan rumah tangga.

Menurut Rahayu et al. (2015) ada 200 definisi serta 450 indikator yang mengenai ketahanan pangan. Selain itu, ketahanan pangan sendiri memiliki lima unsur yang harus di penuhi, yakni orientasi pada individu dan rumah tangga, ketersediaan pangan yang dapat diakses tiap waktu, penekanan akses pangan pada individu serta rumah tangga secara fisik, ekonomi, maupun sosial, orientasi pada pemenuhan gizi, dan bertujuan pada kehidupan yang sehat dan produktif.

Menurut Hartati (2017) ketahanan pangan memiliki 4 unsur yaitu:

1. Ketersediaan pangan setiap waktu untuk rumah tangga dan tingkat individu (*food availability/supply*);
2. Pangan tersebut bisa diakses baik secara ekonomi, fisik, dan sosial, setiap waktu (*access to supplies*);
3. Orientasi ketahanan pangan bertujuan dalam pemenuhan gizi (*food utilization*);
4. Tujuan ketahanan pangan adalah untuk mewujudkan hidup yang produktif dan sehat (*food sustainability*).

Pangan merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan Kebijakan Pemerintah Kalurahan dalam mendukung ketersediaan pangan, dan sejauh apa inovasi yang telah

di terapkan oleh pemerintah Kalurahan Tileng dalam memajukan sektor pangan di desanya. Kebijakan Pemerintah Kalurahan diharapkan dapat memberikan suatu inovasi baru, atau ide ide yang baru yang mampu memberikan suatu kemajuan untuk pangan dalam mengembangkan sektor pangan, sehingga tepat pada sasaran yaitu untuk mengembangkan kapasitas kebijakan pangan yang lebih khusus pada kalurahannya, sebagai aspek pelayanan pemerintah kalurahan dalam peningkatan produktifitas pertanian, oleh sebab itu pemerintah kalurahan harus memberikan perhatian lebih sektor pertanian penerapan inovasi baru tersebut diharapkan dapat meningkatnya produktifitas masyarakat dalam ketersediaan pangan, dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk mengenal suatu inovasi yang baru maka kebijakan pemerintah kalurahan dalam mendukung ketersediaan pangan memerlukan suatu proses pendekatan inovasi yang dapat berupaya untuk meningkatkan kualitas pangan, salah satunya yaitu dengan memberikan metode Pendidikan di lapangan dalam proses Pendidikan di bidang pertanian dilakukan penyuluhan pertanian yang bertujuan agar petani mengalami perubahan, perubahan yang dimaksud yaitu perubahan dalam kapasitas pengembangan baik itu dari sikap dan Tindakan maupun pengetahuan petani menuju kearah yang lebih baik melalui pemberian pengetahuan, informasi, dan kemampuan baru dalam mengelola ketersediaan pangan. Aspek-aspek yang harus di perbaiki dalam proses penyuluhan ini merupakan pengetahuan tentang pangan untuk mendukung proses Pendidikan ini maka perlu dibuatlah kelompok tani, karena kelompok tani memiliki peran yang sangat strategis dalam mengelola sektor pertanian.

Kelompok tani merupakan wadah bagi para petani untuk mendukung ketersediaan pangan di Kalurahan Tileng, kelompok tani juga merupakan Lembaga non formal yang berfungsi memproduksi ketersediaan pangan di kalurahan. Unit produksi bagi para petani dan juga sebagai tempat penyuluhan untuk mendapatkan informasi-informasi

dalam ketersediaan pangan di kalurahan, melalui kelompok tani diharapkan usaha tani akan lebih efisien serta mampu menghadapi krisis pangan dan hambatan disektor pertanian, serta dapat mengembangkan unit usaha yang lebih maju dari yang sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat tani akan meningkatkan pengetahuan yang banyak tentang pertanian dan ketersediaan pangan di kalurahan tileng, selain itu juga dapat meningkatkan sikap yang positif terhadap inovasi dan keberlanjutan dalam usaha tani yang dijalankan, serta tingkat keterampilan yang lain dalam berusaha tani.

Kalurahan Tileng merupakan desa yang terletak di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di bagian Selatan Desa Tileng langsung berbatasan dengan laut (Samudra Hindia). Desa Tileng terdiri atas 16 Dusun, yaitu: Manggung, Ngalangombo, Tileng, Mloko, Sentul, Ngasem, Nanas, Mandesan, Pugeran, Sawah, Papringan, Ngrombo, Banagung, Ploso, Ngiringin, dan Tileng. Desa Tileng memiliki 1.132 KK dan 49 RT. Desa Tileng memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.335 orang. Kalurahan Tileng memiliki potensi dan aset yang banyak di jumpai disana, hal ini dapat dilihat dari sumber daya alam yang sangat berlimpah, kondisi tanah yang sangat subur, dan iklim yang mendukung sehingga membuat hamper semua tanaman bisa tumbuh, tidak hanya memiliki aset atau potensi saja akan tetapi masyarakat Kalurahan Tileng juga memiliki berbagai macam keahlian dalam mengelola sektor pertanian, keahlian tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Kalurahan Tileng untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pembangunan sektor pertanian di kalurahan Tileng diharapkan menjadi Motor penggerak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat untuk ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan lahan pertanian yang ada karena akan memberi dampak yang sangat besar untuk perekonomian masyarakat di Kalurahan Tileng.

Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan dengan Pak Lurah dan Pak

Carik di Kalurahan Tileng, menurut mereka bahwa yang terjadi permasalahan utama di Kalurahan Tileng yaitu Ketersediaan Pangan untuk masyarakat tani yang sangat rendah dikarenakan jenis usaha terbatas, Keterbatasan ketersediaan pangan dalam mengelolah sektor pertanian sehingga kurang begitu memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan perekonomian mereka, lahan yang sangat luas tapi tidak di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat dalam ketersediaan pangan, masih banyak masyarakat yang tidak mampu mengelola ketersediaan pangan dikarenakan masalah modal, menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kalurahan Tileng menerapkan program Khususnya untuk ketersediaan pangan yaitu, penanaman jagung secara monokultur, ternak sapi, pembagian bibit pete dan alpukat ke semua kepala keluarga, dan membangun akses jalan menunjang sarana prasarana sosial ekonomi. Demikian bahwa pelaksanaan program ketersediaan pangan yang telah di salurkan di masyarkat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks, hal ini dapat dilihat bahwa pada kenyataan jauh berbanding terbalik dengan apa yang di harapkan dengan program yang diberikan Pemerintah Kalurahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat batasan-batasan penelitian yang akan di bahas antara lain yaitu:

1. Bentuk Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan.

2. Bentuk Dukungan Masyarakat dalam penerapan Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan.

D. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kebijakan pemerintah kalurahan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan masukan kepada aparat Pemerintah Kalurahan Tileng Khususnya mengenai Kebijakan Pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan
2. Untuk Lembaga akademik, sebagai bahan referensi agar terus berkontribusi terhadap kondisi dan keadaan kalurahan
3. Kemudian untuk saya sendiri untuk menambah pengetahuan mengenai Kebijakan Pemerintah dalam mendukung ketersediaan pangan

F. Litereatur Review

1. Penelitian ini di lakukan oleh Krisdyatmiko (2017), dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan judul Kemampuan Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa warga desa memiliki kearifan lokal untuk mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan memberi kontribusi pangan pada desa atau wilayah lainnya. Emansipasi warga diwujudkan dalam pembaharuan pola pertanian, diversifikasi produksi pertanian, revitalisasi institusi lokal (kelompok tani, adat) untuk mendukung produksi dan distribusi hasil tani. Emansipasi warga didukung dengan kinerja pemerintahan desa untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian. Program dan

kegiatan sebagai tindak lanjut dari kebijakan didasarkan permasalahan pangan warga di tengah potensi/asset lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Program dan kegiatan tersebut didukung dengan ADD yang di beberapa desa di prioritaskan bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Mohamad Ikbah Bahua (2018), dalam Jurnal Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan dengan judul Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dalam Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluaran (*output*) dari penguatan kelembagaan lumbung pangan desa antara lain: (1) Terjadinya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di antara seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dan kebijakan ketahanan pangan nasional dan daerah; (2) Bangkit dan aktifnya petani dan penyuluh pertanian dalam merencanakan dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian secara partisipatif; (3) Terjadinya gerakan perbankan dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk memberikan modal usaha tani serta membimbing sesama petani dalam mengelola Lembaga lumbung pangan desa; (4) Terciptanya konsolidasi lahan antar sesama petani melalui *sistem corporate farming*; (5) Terciptanya pola hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan Badan Urusan Logistik dalam rangka menciptakan jiwa kewirausahaan petani; (6) Memberikan solusi dalam mengatasi masalah fluktuasi harga dan keterbatasan pembiayaan petani dalam mengembangkan usaha agri bisnisnya melalui pengembangan Sistem Resi Gudang; (7) Terjadi komunikasi antara petani, perguruan tinggi dan peneliti melalui desiminasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang inovasi pertanian yang berguna untuk pengembangan produksi pertanian.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Oru (2020), dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul Ketahanan Pangan dan Strategi Livelihood Masyarakat Desa Prai Paha. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Kebutuhan pangan adalah hal penting yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan; (2) Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan sehingga masyarakat mengalami rawan pangan dan tidak dapat mencapai ketahanan pangan; (3) Strategi *livelihood* merupakan cara yang tepat bagi masyarakat untuk bertahan hidup dalam menghadapi krisis dan memenuhi kebutuhan pangan. Namun strategi ini hanya mampu bertahan dalam jangka pendek bukan jangka Panjang dan hanya merupakan sebatas penanganan semata.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Fiandana, Makmur, & Hanafi (2020), dalam Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan judul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah. Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Ketahanan Pangan Pelaksana dan Penyuluhan (BKP3) telah berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi, membentuk Dewan Ketahanan Pangan, pengembangan desa mandiri pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah sesuai aspek-aspek ketahanan pangan.
5. Penelitian ini dilakukan oleh Aisyah (2020), dalam Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia dengan judul Ketahanan Pangan Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Ketersediaan pangan keluarga terkait pandemi COVID-19 tentang ketahanan pangan belum sepenuhnya tercukupi masih

ada yang khawatir akan ketersediaan pangan di masa pandemic COVID-19; (2) Faktor ekonomi terkait dampak COVID-19 sangat memiliki pengaruh yang cukup besar terutama pendapatan yang dihasilkan dapat mengalami penurunan. Selain mengalami penurunan pendapatan beberapa responden juga memiliki pengeluaran yang cukup tinggi setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga serta pengeluaran biaya non konsumsi seperti membayar cicilan rumah, mobil, dan lain lain juga sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga; dan (3) Sumber pangan yang didapat oleh masyarakat ditempat adalah 88 dari 95 responden dengan presentase (92,6%) mendapat sumber pangan berupa karbohidrat berasal dari pasar, dan masih sedikit masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan Peneliti terdahulu diatas yang berkaitan dengan penelitian saya, dari kelima penelitian terdahulu berfokus pada strategi pemerintah dalam mengelolah ketahanan pangan, dan hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan merupakan salah satu sub sistem dari ketahanan pangan. Sementara itu penelitian saya ingin meneliti lebih dalam tentang bentuk inovasi kebijakan pemerintah desa dalam mengelola ketersediaan pangan. Keterkaitan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu bagaimana pemerintah desa dalam mengelolah pangan dan dukungan masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengelolah pangan. Oleh karena itu penelitian saya berkeinginan meneliti lebih dalam tentang Bentuk Inovasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan dan Bentuk Dukungan Masyarakat dalam penerapan Inovasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan.

G. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan

Kebijakan yang dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt menyatakan bahwa: “Kebijakan dapatlah diberi definisi sebagai suatu keputusan yang siap dilaksanakan dengan ciri adanya kemantapan perilaku dan berulangnya tindakan, baik oleh mereka yang membuatnya maupun oleh mereka yang harus mematuhiya”. Sedangkan Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai langkah ketetapan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah:

- (a) Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- (b) Kebijakan berisi tindakan-tindakan pemerintah;
- (c) Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh individu, kelompok, badan atau institusi, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan;
- (d) Kebijakan yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan untuk tidak melakukan sesuatu;
- (e) Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepaladesa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki Pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Dan Pemerintah Pusat, (sugiman 2018)

Desa merupakan pembagian wilayah administrative dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala Desa dan organisasi pemerintahan yang berhak menyelenggarakan urusan Pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah tangga Desanya, memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengelola potensi-potensi lokal yang ada sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan meemanfaat dalam pembangunan masyarakat. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan Desa akan mempermudah kinerja dalam melaksanakan tugasnya, maka dalam pelaksanaan suatu Pemerintah Desa diperlukan adanya kinerja yang jelas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugasnya.

Pemerintah Desa merupakan Pemerintah terendah sebagai penghubung Pemerintah Indonesia dengan masyarakat, maka kedudukan Desa dalam proses pembangunan sangatlah penting, Karena Desa merupakan daerah yang harus dimaksimalkan, pemerintah memberikan program-program pembangunan, pelatihan, dan pemberian sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan Desa, guna memenuhi unsur pemerataan pembangunan, langkah seperti program-program Pemerintah, pemberian pelatihan kepada masyarakat, dan

pembangunan infrastruktur yang hasil-hasilnya berujung pada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa bertanggung jawab secara langsung serta memelihara masyarakatnya untuk mempertahankan standar hidup yang layak, maka pemerintah desa berhak mengelolah sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang di atur dalam UU Desa No 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 Pemerintah Desa adalah urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang mengurus urusan yang ada di tingkat desa demi kepentingan masyarakat yang di bantu oleh perangkat desa.

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan, Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar Seiring dengan perkembangan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat, Pemerintah modern, pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Rasyid 2011: 13, Osborne dan Geabler yang dikutip Rasyid 2011: 19, menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah untuk mencari cara menyenangkan warganya.

Menurut definisi PBB tentang pembangunan masyarakat disebut pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu

melakukannya sendiri, misalnya dalam hal perencanaan, awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat, kemudian perencanaan bersama masyarakat, dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat, Pemerintah dapat juga melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang dapat berfungsi memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan hal-hal lain guna meningkatkan keberhasilan pembangunan.

3. Ketersediaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 BAB 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menjelaskan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut diketahui bahwa Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk

menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menjelaskan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasi dan dikelola oleh Pemerintah; Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasi dan dikelola oleh pemerintah provinsi; Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasi yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota; Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa; dan Cadangan Pangan Masyarakat adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Ketersediaan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan Pangan merupakan salah satu subsistem dari ketahanan Pangan. Subsistem ketersediaan Pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya (Coop Indonesia Foundation, 2010:1).

Saat ini, dalam kondisi transisi ekonomi yang cepat dimana industrialisasi, urbanisasi, dan desentralisasi politik bersilangan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang memperlebar kesenjangan regional dan peningkatan tingkat kemiskinan, Indonesia menghadapi beban ganda kekurangan gizi, (termasuk defisiensi mikronutrien) dan kelebihan gizi (kelebihan berat badan dan obesitas) didalam daur hidup populasi yang sama (Hanandita & Tampubolon, 2015; Vaezghazemi,2017).

Permasalahan secara umum mengenai ketersediaan pangan adalah jumlah

penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Demikian juga permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan-pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktifitas masyarakat. Ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dan sektor non pangan. Secara spesifik pemarsalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

Badan Ketahanan Pangan Menyusun Kebijakan Umum mengenai Ketahanan Pangan yang arahnya adalah mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah dan nasional sepanjang waktu dan tertata melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inofasi dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengentaskan dari kemiskinan.

Strategi pelaksanaan kebijakan umum menuju kepada sasaran yang dilakukan melalui jalur ganda (Badan Ketahanan Pangan, 2012):

- a) Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
- b) Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri.

Kedua strategi dijalankan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu

pemerintah, masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, organisasi massa, organisasi sosial, koperasi dan pelaku usaha. Kecukupan pangan nasional tidak menjamin bahwa semua desa memperoleh pangan yang dibutuhkan sehingga fokus ketahanan pangan adalah rumah tangga yang ada diberbagai desa. Kebijakan ketahanan pangan difokuskan kepada pemberdayaan rumah tangga dan masyarakat desa agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah-masalah pangan yang di hadapi.

Pemberdayaan ketersediaan pangan masyarakat diimplementasikan melalui program desa mandiri pangan yang dimulai pada tahun 2005 (Nainggolan, 2006). Pemantapan ketersediaan pangan masyarakat melalui program ini adalah mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga yang secara kumulatif diharapkan dapat menopang ketahanan pangan di tingkat desa dan tingkat wilayah.

Berdasarkan pernyataan Nainggolan (2006) prinsip pengembangan model desa mandiri pangan adalah:

- a) Kemampuan pengelolaan ketahanan pangan di tingkat desa,
- b) Kemampuan upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan pangan,
- c) Kemampuan menangani masalah kelebihan atau kekurangan pangan dan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pangan, serta
- d) Prinsip-prinsip pemberdayaan ketahanan pangan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menerjemahkan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, yang dalam hal ini merupakan hasil produksi oleh masyarakat dan bantuan dari pencadangan oleh Pemerintah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Peneliti harus membangun hubungan dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang detail yaitu dengan mengamati dan menggali Inovasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian merupakan sumber informasi yang mengetahui tentang informasi dari Penelitian yang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat Kalurahan Tileng. Teknik penentuan narasumber atau informan menggunakan teknik *purposive*, yaitu penentuan responden dengan maksud tertentu (Sugiyono 2015:124). Teknik ini dipilih berdasarkan anggapan bahwa narasumber memiliki kapasitas untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kalurahan:

- a. Lurah
- b. Kaur Tatalaksana
- c. Kepala Dukuh Kalurahan Tileng

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL): satu (1) orang (ketua)
3. Rukun Tetangga (RT): dua (2) orang (Ketua RT 1 dan Ketua RT 2)
4. Masyarakat: kurang lebih lima (5) orang (yang dianggap penting untuk di wawancarai dan disesuaikan dengan keadaan pada saat penelitian)

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode deskriptif kualitatif menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi.

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan apabila penelitiannya berkenaan dengan tingkah laku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang akan diamati tidak terlalu besar (Sugiyono 2015:203). Metode observasi sering kali diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada subjek penelitian. Teknik observasi sebagai pengamatan dan pencatatan hendaknya dilakukan pada subjek yang secara aktif mereaksi terhadap objek.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk bertukar informasi dan ide melalui tanggung jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksud dalam suatu topik tertentu. Kegiatan wawancara dilakukan dengan informan dan *key informan* secara langsung dilokasi penelitian. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang didapat secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun proses

wawancara: (1) wawancara pembicaraan informal, (2) pendekatan dengan menggunakan pedoman wawancara, (3) wawancara secara terbuka (Sugiyono 2015:72).

c) Dokumentasi

Menurut (Sugiyono 2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya. Teknik ini juga merujuk pada dokumen publik misalkan: makalah, jurnal, dan arsip-arsip. Teknik dokumentasi ini akan membantu peneliti dalam melengkapi data-data yang kongkrit. Karena, peneliti tidak bisa menebak atau memalsukan data yang seharusnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan yang dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis Data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai lapangan. Adapun Langkah-langkah yang diambil dalam menganalisis data adalah sebagai berikut (Sugiyono 2015:38):

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Perolehan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data yaitu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Setiap mereduksi data maka

peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing Verification*)

Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel yang terverifikasi. Hal tersebut berarti bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah ditemukan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang seiring pelaksanaan penelitian di lapangan.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH KALURAHAN TILENG KAPANEWON GIRISUBO

KABUPATEN GUNUNG KIDUL

A. Geografis

Keadaan geografis Kalurahan Tileng sebagian besar berada di pinggiran selatan Kabupaten Gunungkidul dengan kondisi wilayah terdiri atas 3 yakni pemukiman, tegalan sawah tadah hujan, dan sapadan laut atau kawasan pesisir. Kalurahan Tileng merupakan salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 17.721 Ha, yang lahir pada tahun 1921. Kalurahan Tileng jika dilihat pada peta terletak pada titik koordinat 110.74905 BT/ -8.172675 LS, dengan tipologi daerah Pesisir/nelayan dan berklasifikasi sebagai kalurahan Swasembada kategori Mula. Secara geografis Kalurahan Tileng berada pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, dengan topografi dataran tinggi serta banyaknya curah hujan 2000 mm. Pada ketinggian tersebut kalurahan ini bersuhu udara rata-rata 79 derajat Celcius.

Secara Administratif Kalurahan Tileng batas wilayah Kalurahan Tileng yaitu :

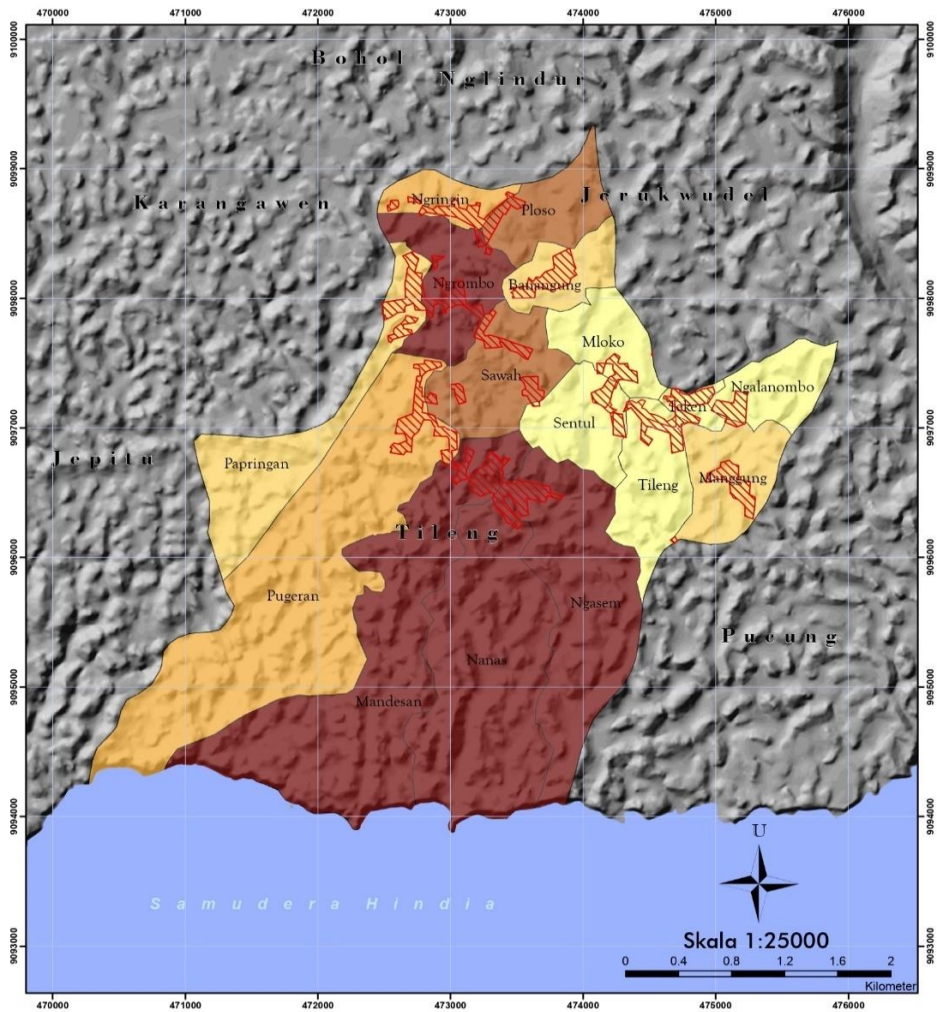
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Nglindur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Pucung dan Kalurahan Jerukwudel, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Karangawen dan Kalurahan Jepitu, Kapanewon Gunung Kidul.

Sedangkan orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) seperti yang sudah tercantum dalam data monografi Kalurahan Tileng menjelaskan bahwa sebagai berikut

1. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 2,5 Km.
2. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota/IbuKota Kabupaten 40 Km.
3. Jarak Dari Ibu Kota Provinsi 80 Km.

Berikut merupakan peta wilayah Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Kalurahan Tileng



PETA JUMLAH TERNAK SAPI DI DESA TILENG TAHUN 2017



Dari gambar berupa peta diatas, dapat kita lihat dan amati pemetaan wilayah administrasi di Kalurahan Tileng sangat luas, dan ada 16 Padukuhan, Rukun Tetangga (RT) 49, Rukun Warga (RW) 16 yang mana tersebar disetiap wilayah Kalurahan Tileng.

B. Demografis

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data mengenai jumlah kependudukan di Kalurahan Tileng tercatat yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang dan perempuan 1.187 orang sehingga jumlah keseluruhan masyarakat Tileng berjumlah 4.368 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kalurahan Tileng masyarakat yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, meskipun tidak begitu jauh jarak jumlahnya. Dengan demikian jumlah Kepala Keluarga berjumlah 1.223 orang dengan kepadatan penduduk 4 Jiwa/KM². Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan jumlah penduduk :

Tabel 1.1
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)
Laki-laki	2.181	4.368	1.223	4
Perempuan	2.187			

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas mengenai rincian jumlah penduduk di Kalurahan Tileng dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 2.187 orang sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 2.181 orang, keduanya memiliki selisih yang tidak terlalu jauh.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk Kalurahan Tileng dengan jumlah usia terbanyak 26-40 tahun yang berjumlah 943 orang dan yang jumlahnya paling sedikit berjumlah 47 yaitu di usia >75 tahun. Dimana Kalurahan Tileng memiliki banyak orang dewasa, terutama orang tua kalangan perempuan berjumlah 490 orang dan laki-laki 453 orang. Kemudian untuk yang berusia >75 tahun paling sedikit laki-laki

mendominasi berjumlah 26 orang dan perempuan 21 orang. Berikut merupakan rincian tabel berdasarkan golongan usia:

Tabel 1.2
Penduduk Berdasarkan Usia

Kelompok Umur (Usia)	Laki-laki	Perempuan
Usia 0-6 Tahun	125	119
Usia 7-12 Tahun	108	144
Usia 13-18 Tahun	178	189
Usia 19-25 Tahun	181	211
Usia 26-40 Tahun	453	490
Usia 41-55 Tahun	479	451
Usia 56-65 Tahun	312	276
Usia 65-75 Tahun	319	286
Usia >75 Tahun	26	21
Jumlah	2.155	2.166

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Dari tabel diatas tampak bahwa kelompok usia 26-40 tahun merupakan jumlah penduduk berdasarkan usia dengan jumlah paling banyak. Untuk jumlah penduduk berdasarkan usia dengan jumlah paling sedikit atau rendah adalah kelompok usia >75 tahun. Adapun anggota dari kelompok pengolah abon ikan tuna di Kalurahan Tileng didominasi oleh kelompok usia 26-40 tahun. Hal ini dikarenakan mereka masih masuk di dalam pengelompokan usia produktif serta masih mampu dalam melakukan pengolahan pertanian.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Di Kalurahan Tileng berprofesi sebagai petani, dimana didominasi oleh laki-laki 800 orang dan disusul oleh perempuan berjumlah 200 orang. Kemudian pekerjaan sebagai perangkat Kalurahan di dominasi oleh laki-laki 28 orang dan perempuan 1 orang, memperlihatkan minimnya peran perempuan dalam keterlibatan menjadi pamong kalurahan.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan/Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
Petani	800	200	1.000
Buruh Tani	80	80	160
Ibu Rumah Tangga	0	640	640
Perangkat Desa	28	1	29
Buruh Harian Lepas	480	230	710
Jumlah Total (Orang)	1.388	1.151	2.539

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Di lihat dari tingkat pendidikan yang paling dominan adalah tamatan SMA/ sederajat yang berjumlah 779 orang, yang terdiri 501 orang laki-laki dan 238 orang perempuan. Kemudian yang paling sedikit adalah lulusan Sarjana (S-1) yakni berjumlah 140 orang terdiri dari 80 orang laki-laki dan 60 orang perempuan. Sehingga, dapat disimpulkan secara tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan diri dari wajib pendidikan wajib belajar.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
SD/ sederajat	340	231	571
SMP/ sederajat	330	211	541
SMA/ sederajat	501	238	779
S-1/ sederajat	80	60	140
Jumlah Total (orang)	1.251	740	1.991

Sumber: Profil Kalurahan Tileng 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling mendominasi adalah tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 779 orang penduduk. Minimnya penduduk Kalurahan Tileng yang melanjutkan pendidikan sampai S1, menyebabkan tingkan pendidikan S1 hanya 140 orang saja. Sedangkan untuk pendidikan S2, belum ada satu orang pun yang sudah menempuh pendidikan S2. Dengan demikian tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Tileng mayoritas berpendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA) hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap pekerjaannya dimana mayoritas dari Kelompok Tani adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan SMA. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada pengalaman, wawasan dan tingkat pengetahuan masyarakat serta mental yang kuat terutama pada kelompok Tani yang dimana mereka masih kesulitan di dalam melakukan pemasaran, pengemasan (*Packging*), dan di dalam pengolahan hasil pertanian dan ketersediaan pangan.

C. Sosial Ekonomi

Bidang Pemberdayaan sosial sejauh ini di Kalurahan Tileng sudah terbangun dengan baik, terlihat dari adanya lembaga-lembaga pemberdayaan yang umumnya sudah dijalankan. Disisi lain, Kalurahan Tileng adalah Desa Pancasila dimana toleransi beragama yang sangat kuat dan tinggi. Masyarakat hidup rukun dalam perbedaan, dan sudah mampu berdaya secara ekonomi yang umumnya melalui sektor perranian. Dari sisi lingkungan, Kalurahan Tileng adanya pembangunan jalan sebagian besar sudah baik. Tidak hanya itu dari sisi lingkungan pemerintah kalurahan sudah berupaya untuk memberikan himbauan dan ajakan pelestarian lingkungan salah satunya dengan larangan merokok dikeramaian. Tidak hanya itu aspek ini juga didukung dengan adanya Sekolah Alam yang mana diperuntukkan untuk mendorong berbagai aspek, tidak hanya alam tapi juga pelestarian budaya melalui kesenian.

Secara ekonomi dapat dikatakan sudah cukup stabil hal ini didukung dengan ketahanan pangan masyarakat yang cukup tangguh. Pemerintah kalurahan juga sudah berupaya untuk terus mendorong pembangunan ekonomi melalui adanya Budaya Maritim yang itu bergerak di sektor kelautan dan juga pertanian. Hal ini didukung dengan adanya kelompok pelaku ekonomi seperti pengrajin tempe, pengelola abon tuna, singkong, dan kacang tanah. Terkait median dan komunikasi pada dasarnya

pemerintah kalurahan sudah memfasilitasi masyarakat melalui pembangunan tower jaringan demi mempermudah layanan komunikasi. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat umumnya melalui papan informasi yang terletak di beberapa tempat strategis. Tidak hanya itu, kalurahan sendiri telah memiliki web desa yang bisa diakses oleh masyarakat lokal dan dari luar terkait info seputar Kalurahan Tileng. Relasi komunikasi juga telah terjalin melalui forum-forum pemberdayaan yang ada.

Adapun gambaran dari sosial ekonomi Kalurahan Tileng yang di dalamnya terdapat kelembagaan serta beberapa usaha ekonomi yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Lembaga Ekonomi, dan Unit Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) terdiri atas 1 unit, dengan jumlah kegiatan sebanyak 5 dan memiliki kepengurusan inti 6 orang.
2. Jasa Lembaga Keuangan terdiri atas Industri Kecil dan Menengah seperti industri makanan sejumlah 7 unit, dengan anggota kepengurusan sebanyak 35 orang.
3. Usaha Jasa dan Perdagangan yang terdiri atas Usaha toko/kios sebanyak 6 unit, dengan jenis produk yang diperdagangkan (umum, sayur, barang dan jasa tambang, dll) dengan menyerap 9 orang tenaga kerja. Toko Kelontong sebanyak 75 unit yang menyerap 17 orang tenaga pekerja.
4. Usaha Jasa Gas, Listrik, BBM dan Air yang mana berupa Usaha Penyewaan Tenaga listrik sebanyak 1 unit, Pengeceran Gas dan Bahan Bakar 57 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 60 tenaga kerja.
5. Usaha Jasa Keterampilan yang terdiri dari Tukang Kayu 115 unit, Tukang Batu 134 unit, Tukang Jahit/bordir 16 unit, Tukang Cukur 1 unit, Tukang Service Elektronik 5 unit, dan Tukang Pijat/Pengobatan 16 unit. Secara keseluruhan menyerap tenaga kerja sebanyak 287 orang.

D. Sarana Dan Prasarana

Secara umum Kalurahan Tileng telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti yang dapat kami jelaskan dibawah ini:

1. Prasarana transportasi Darat yakni 1.5 panjang jalan konblok/semen/beton yang sejauh ini sudah cukup baik sepanjang 13.200 Km serta sarana transportasi darat 1 unit. Selain itu adanya transportasi sungai dengan kondisi cukup baik .
2. Prasarana komunikasi yang terdiri atas telepon 37.654 pelanggan GSM, tersedianya TV Umum 13, jumlah radio 782, dan Parabola 563 unit.

3. Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi di beberapa padukuhan yang terdiri dari sumur galian 9 unit, dan PAH 1267 unit. Sanitasi sumur resapan air rumah tangga sebanyak 4.301 rumah dan hampir semua memiliki jamban pembuangan yang layak.
4. Meskipun daerah yang mayoritas kegiatan masyarakat petani namun, hingga saat ini belum memiliki irigasi pengairan.
5. Sarana dan prasarana rumah produksi khusus dari Pemerintah Desa untuk ketersediaan pangan yaitu berupa pembagian bibit pertanian setiap kepala keluarga dan adapun pengawalan untuk cara menanam bibit yang telah di bagikan oleh pemerintah tidak hanya di bagikan lalu dibiarkan saja namun diberi pemahaman cara menanam benih yang telah dibagikan tersebut.
6. Sarana dan prasarana untuk lahan pertanian bagi petani yang belum meiliki tanah untuk lahan pertanian diberikan/disewakan tanah kas desa untuk lahan pertanian bagi masyarkat yang tidak memiliki lahan pertanian, dalam rangka mendukung ketersediaan pangan dan juga ketahanan pangan.

E. Budaya

Kalurahan Tileng secara umum kaya akan budaya baik itu kesenian, dalam bertani, maupun dalam pola hidup sebagaimana kehidupan masyarakat di desa. Salah satunya adalah budaya pertanian “Tumpangsari” yang sudah secara turun temurun dilakukan. Tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran (Polyculture) berupa dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan. Tumpang sari yang umum dilakukan adalah penanaman dalam waktu yang hampir bersamaan untuk dua jenis tanaman budidaya yang sama, seperti jagug dan kedelai, atau jagung dan kacang tanah. Di desa tileng ini para petani hanya mengandalkan curah hujan jadi mereka hanya memiliki kesempatan bertanam hanya satu kali dalam setahun, dan apa saja yang mereka tanam yaitu untuk ketersediaan pangan yaitu mereka menanam padi, singkong, dan jagung, dan setelah itu mereka menanam kacang tanah.

Selain itu, adanya kebudayaan dalam hal ini kesenian seperti Rasulan, Ketoprak, Jathilan, dan lainnya. Meskipun demikian, budaya-budaya ini sebagian besar masih dipegang teguh oleh masyarakat namun tidak sedikit yang juga mulai meninggalkan budaya yang ada.

F. Pertanian

Kegiatan sehari-hari yang dilakukan warga secara rutin adalah pergi ke ladang dan baru beraktivitas bersama warga lainnya di sore dan malam hari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum memiliki tujuan memetakan potensi wilayah, khususnya terkait dengan potensi pertanian dan peternakan. Desa Tileng merupakan salah satu wilayah yang berada di perbukitan karst, sehingga sumberdaya air di lokasi ini cukup terbatas. Apabila musim kemarau tiba, wilayah ini sering dilanda kekeringan. Bahkan masyarakat juga perlu membeli air melalui truk tangki air keliling saat kekeringan melanda. Dengan kata lain, akses masyarakat terhadap ketersediaan air bersih cukup terbatas. Hal ini tentu akan berpengaruh juga terhadap potensi pertanian dan peternakan di Desa Tileng. Adapun luas lahan masing-masing kelompok tani dibawah ini.

Tabel 1.5
Luas Lahan Masing-masing Kelompok Tani

No	Nama Kelompok	Luas Lahan Pertanian (ha)
1	Akur	23,25
2	Manunggal	26
3	Ngudi Basuki	43,7
4	Jibar Jibur	29,9
5	Ngudi Makmur	45
6	Adem Ayem	30,7
7	Tani Makmur	81,4
8	Mandesan	42
9	Tani Maju	94,2
10	Makaryo	29,1
11	Ngudi Lancar	39
12	Makmur	31,15
13	Banagung	41,4
14	Budi Makmur	21,9
15	Ploso	59,18
16	Subur	29,81
	Total	1.520.00

Sumber: Data Profil Kalurahan Tileng 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa di Kalurahan Tileng terdapat 16 kelompok tani, dengan luas lahan pertanian paling kecil di miliki oleh kelompok tani Budi Makmur yakni 21,9 ha dan luas lahan pertanian paling luas dimiliki oleh kelompok tani Tani Maju yakni 94,2 ha serta luas keseluruhan lahan pertanian di Kalurahan Tileng yakni 1.520.00 ha. Adapun hasil pertanian yang ditanam dan dihasilkan oleh para petani ini sendiri yakni padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedelai, cabai, bawang dan juga sayur-sayuran. Namun yang paling banyak dihasilkan yakni padi dan jagung. Hasil pertanian dimanfaatkan untuk sumber pangan masyarakat, untuk industri yakni Kacang tanah dan lainnya dijual ke tengkulak atau di pasar Ngrancah. Dengan status kepemilikan pribadi, sewa, atau penggarap, dengan rata rata kepemilikan 2000 m. Adapun harga setiap produk pertanian, banyaknya produk pertanian yang dihasilkan dan berapakali tanam dalam setahun, dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.7

Informasi Produk Pertanian

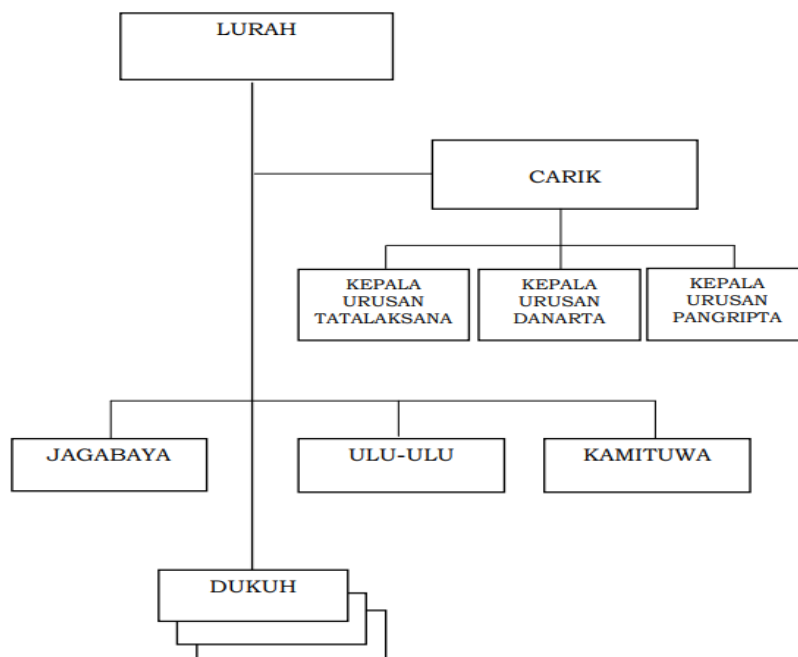
No	Jenis Tanaman	Banyak Produk Pertanian Yang Dihasilkan (ton)	Harga Rp/Kg
1	Padi	4 ton	Rp.6.000/ kg
2	Jagung	52 ton	Rp.4.000/kg
3	Cabai	6 ton	Rp.15.000/kg
4	Kacang Tanah	2 ton	Rp.13.000/kg
5	Bawang Merah	7,5 ton	Rp.38.200/kg
6	Kacang Kedelai	1,8 ton	Rp.15.000/kg
7	Ubi Kayu	5,2 ton	Rp.7.500/kg

Sumber: Data kalurahan Tileng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwasannya harga dari masing-masing peroduk pertanian di Kalurahan Tileng, Produk pertanian dengan harga paling tinggi yakni bawang merah dan produk pertanian dengan harga terendah yakni jagung. Serta produk pertanian yang memiliki hasil panen paling besar adalah jagung yakni 52 ton dalam satukali panen dan produk pertanian dengan hasil paling kecil yakni kacang kedelai 1,8 ton. Pelaksanaan panen di dalam setahun paling banyak hanya satu kali dalam setahun. Harga dan banyaknya produk pertanian yang dihasilkan dapat berubah-ubah terkadang sesuai dengan kebutuhan pasar dan juga tergantung curah hujan, pengairan, fasilitas, dan pengelolaan dalam hal pemberantasan hama tanaman, bibit tanaman dan pupuk. Dari semua jenis tanaman pertanian diatas panen hanya satu tahun sekali dikarenakan di kalurahan tileng ini merupakan salah satu daerah perbukitan dan dimana lahan pertaniannya masih menggunakan curah hujan, dan ini menjadi salah satu alasan mengapa hanya setahun sekali panen hasil pertanian dikarenakan belum adanya sistem irigasi dan juga dimana daerah tileng ini daerah perbukitan karst yang sulit untuk dibangun sistem irigasi.

G. Pemerintahan

Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Gunungkidul, DIY dipimpin oleh Suwardi, S.Pd selaku Lurah dan dibantu oleh perangkat desa dan dibantu oleh kepala dusun/dukuh. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Kalurahan Tileng sebagai berikut :



Gambar 1.2 Struktur Pemerintahan Kalurahan Tileng

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Dewan Ketahanan Pangan. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 2009. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan Hanandita,
- W., & Tampubolon, G. 2015. The double burden of malnutrition in Indonesia: Social determinants and geographical variations. *SSM - Population Health*, 1, 16–25.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2020. Mitigasi Krisis Pangan. Tim Riset Stabilitas. Jakarta Selatan
- Nainggolan K. 2006. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan dan DPP PERGIZI Pangan.
- Perum Bulog. 2020. Jakarta Selatan
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zhou Chief, Tim Penerjamah. 2020. Buku Panduan Pencegahan Coronavirus 101 Tips Berbasis Sains Dapat Menyelamatkan Hidup Anda. <https://lawancovid19.tangerangselatankota.go.id/uploads/file/bukupanduanpencegahancorona.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. 2020. Pangan di Tengah Pandemi

COVID-19. Jakarta: Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Jakarta Selatan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Gemas. 2020. Pedoman Kesiapsiagaan

Menghadapi Infeksi, Novel Coronavirus (2019-nCoV). Jakarta: Kementerian Kesehatan

RI Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

<https://www.kemendes.go.id/resources/download/infoterkini/Coronavirus>

/DOKUMEN_RESMI_Pedoman_Kesiapsiagaan_nCoV_Indonesia_28%

20Jan202020.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi. 10

Agustus 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Program

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan

Tahun Anggaran 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan Dan Gizi. 19 Maret 2015.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60. Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 September 2014. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan. 16 November 2012. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta

Sumber Jurnal

- Achsanuddin, A.N., Fitrianti, A.N., & Melinda, F. 2017. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujang Kecamatan Bontolempangan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 13 No 1, 140-148.
- Aisyah, Siti Iseu. 2020. Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi COVID19: *Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia*, Vol. 16, No. 2, September 2020
- Anjarwani, T. 2018. Upaya guru pendidikan agama islam dalam mengembangkan multiple intellegences siswa kelas VII Di SMP Swasta Karya Bunda Kec. Percut Sei Tuan. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Bahua, Mohamad Ikbal. 2018. Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dalam Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan: *Informasi* Vol. 16, No. 02, Tahun 2018
- Budiyanti Eka. 2020. Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia: *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategi*, Vol. XII, No. 4/II/Puslit/Februari/2020
- Fianda, Yanuar. Mochammad Makmur. Imam Hanafi. 2020. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah: *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 10. 2020
- Krisdytmiko. 2017. Kemampuan Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Pembelajaran Dari Indonesia Timur: *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.1, No 2, Desember 2017

- Melinda, V., & Suwardi. 2021. Upaya Guru Menanamkan Kemandirian Anak dalam Pembelajaran di Sentra Seni. *Jurnal AUDHI*, Vol. 3, No. 2, 75-86.
- Muhyiddin. 2020. COVID-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia: *The Indonesian Journal of Development Planning* Vol IV No. 2. 2020
- Oru, Serly Banja. 2020. Ketahanan Pangan dan Strategy Livelihood Masyarakat Desa Prai Paha: Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Setya Wacana
- Selamat, M.D. 2020. Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Governance*, Vol 5, No 1, 1- 10.
- Simanjuntak, Atmazer H. Rudy G. Erwinsyah. 2020. Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi COVID-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. *Sosio Informa* Vol. 6 No, 02. Mei-Agustus 2020

Kutipan

- 20 Negara dengan Kasus Aktif Corona Tertinggi, Indonesia Nomor 14 Halaman all - Kompas.com diakses tanggal 3 Mei 2021 21:29 WIB
- Eka, Budiyantri. 2020. Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia, diakses tanggal 10 Maret 2021 17:37 WIB
- BPS Kabupaten Sleman. 2019. Kecamatan Moyudan dalam Angka. Yogyakarta: CV. Magna Raharja Tama